

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi atau hiburan, tetapi juga memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian dan devisa negara (Yoeti, 2016). Selain itu, pariwisata juga berperan untuk memperkenalkan potensi alam maupun budaya dari suatu daerah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan maupun fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Dalam pembangunan nasional, sektor pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, serta lapangan kerja.

Perkembangan pariwisata saat ini menunjukkan bahwa minat wisatawan tidak hanya terfokus pada wisata massal, akan tetapi mulai menyebar ke berbagai alternatif wisata lain seperti kawasan wisata alam dan aktivitas luar ruang (*nature-based tourism*) (Terkenli & Georgoula, 2022). Wisata berbasis alam mampu memberikan pengalaman yang lebih mendalam karena wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan yang dikunjungi. Perubahan pada pola perjalanan tersebut menunjukkan bahwa wisatawan semakin tertarik wisata yang memberikan pengalaman berbeda dari kegiatan wisata pada umumnya (Umi *et al.*, 2023). Kondisi tersebut menuntut pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperhatikan kualitas pengelolaan serta keberlanjutan lingkungan sebagai daya tarik utama suatu

destinasi wisata (World Tourism Organization, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan suatu daya tarik wisata harus mempertimbangkan jumlah kunjungan, kualitas pengelolaan, serta keberlanjutan sumber daya.

Preferensi wisatawan menunjukkan peralihan ke arah wisata minat khusus yang berfokus pada aktivitas spesifik yang menekankan pada keterlibatan langsung wisatawan, seperti wisata alam maupun wisata pendakian. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa setelah pandemi, wisatawan lebih banyak memilih wisata yang dilakukan di alam terbuka (Gunawan & Rachim, 2022). Aktivitas tersebut memiliki intensitas kerumunan yang relatif lebih rendah sehingga memberikan pengalaman yang lebih berkesan dibandingkan dengan wisata massal (Sukariyanto *et al.*, 2023)

Secara global, sektor *adventure tourism* sebagai bagian dari wisata minat khusus menunjukkan perkembangan yang pesat dengan nilai pasar mencapai sekitar USD 406 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 16,8% per tahun hingga 2030 (Grand View Research, 2026). Laporan industri lainnya memperkirakan *adventure tourism* akan tumbuh dengan rata rata pertumbuhan per tahun sebesar 17.5% pada periode 2025-2031, yang didorong oleh minat masyarakat terhadap pengalaman *outdoor* termasuk aktivitas pendakian (Lucintel, 2026) . Tren tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata yang menekankan pengalaman petualangan di alam terbuka semakin diminati oleh wisatawan di berbagai negara.

Meskipun data tersebut bersifat global, tren ini memberikan gambaran umum mengenai meningkatnya ketertarikan terhadap wisata petualangan yang juga

relevan dengan konteks wisata pendakian. Sejalan dengan tren tersebut, media nasional melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, sekitar 350 ribu wisatawan mancanegara dan 9 juta wisatawan dari indonesia melakukan aktivitas pendakian di Indonesia (Zatnika, 2023). Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan ke daya tarik wisata alam termasuk aktivitas pendakian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa saat ini wisata minat khusus menjadi salah satu bagian dari sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Salah satu aktivitas yang termasuk wisata minat khusus yaitu pendakian gunung dengan pengalaman eksplorasi alam sekaligus tantangan fisik bagi wisatawan, kebutuhan pengelolaan juga berbeda dibandingkan aktivitas wisata pada umumnya (Muharis *et al.*, 2025). Aktivitas pendakian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis wisata lainnya karena aktivitas ini tidak hanya menuntut kondisi fisik yang memadai dari wisatawan, tetapi juga memerlukan pengelolaan risiko yang baik, serta memperhatikan keselamatan dan pelestarian lingkungan. Adanya karakteristik tersebut, pengelolaan pada jalur pendakian tidak dapat disamakan dengan pengelolaan daya tarik wisata pada umumnya.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa peningkatan minat wisatawan pada aktivitas pendakian harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak agar risiko kecelakaan, konflik, kerusakan lingkungan dapat diminimalisir (Sapardi, *et al.*, 2021; Nur & Prathama, 2023; Muntasib *et al.*, 2021). Kebutuhan akan pengelolaan wisata pendakian yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan jalur pendakian tidak hanya

bergantung pada satu pihak saja. Namun, membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder* dikarenakan aktivitas pendakian melibatkan banyak aspek, yaitu keselamatan pendaki hingga kelestarian lingkungan (Ardiansyah, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan jalur pendakian tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak dalam aktivitas wisata tersebut (Amalyah & Hakim, 2016).

Pihak-pihak tersebut antara lain masyarakat lokal, komunitas pendaki, pengelola jalur, serta pemerintah desa dan lembaga terkait lainnya. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang berada dalam kawasan wisata dan memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan serta potensi yang ada di wilayah tersebut. Komunitas pendaki juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian jalur pendakian melalui kegiatan pelatihan, konservasi, edukasi pendaki, serta partisipasi dalam kegiatan pengelolaan jalur (Fatin *et al.* , 2024). Setiap *stakeholder* memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam mendukung keberlangsungan aktivitas pendakian, dengan adanya keterlibatan berbagai *stakeholder*, pengelolaan jalur pendakian diharapkan mampu menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan (Ardiansyah, 2021).

Namun, dalam penerapannya, keterlibatan para *stakeholder* belum berjalan secara optimal dan terkoordinasi dengan baik (Amalyah & Hakim, 2016). Pada pengembangan ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Kabupaten Bogor, terdapat perbedaan tingkat pengaruh dan kepentingan antar *stakeholder* sehingga tidak semua *stakeholder* memiliki peran yang sama dalam pengelolaan. Stakeholder dengan tingkat pengaruh dan kepentingan tinggi berperan lebih

dominan dalam pengambilan keputusan, sedangkan stakeholder lainnya memiliki keterlibatan yang lebih terbatas (Ardiansyah, 2021). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dalam pengelolaan daya tarik wisata alam, sehingga proses pengelolaan tidak berjalan secara berkelanjutan yang pada artinya dapat berdampak pada keselamatan pendaki maupun kelestarian lingkungan (Fatin *et al.* , 2024). Situasi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran *stakeholder* dijalankan dalam pengelolaan jalur pendakian, khususnya pada daya tarik wisata yang masih berkembang. Pemahaman tersebut penting untuk mengetahui bentuk keterlibatan setiap pihak serta bagaimana koordinasi antar *stakeholder* dapat dilakukan secara lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata pendakian (Amalyah & Hakim, 2016).

Kondisi tersebut relevan dengan peresmian Jalur Pendakian Sumber Lumpang di Gunung Penanggungan pada 16 November 2025 menjadi fenomena penting dalam pengembangan wisata berbasis alam di Kabupaten Mojokerto. Pembukaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang di Gunung Penanggungan menambah variasi rute pendakian di kawasan tersebut dan menarik minat komunitas pendaki serta media lokal (Redaksijatim, 2025). Sebagai jalur pendakian yang relatif baru, Sumber Lumpang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata minat khusus. Namun, kondisi jalur yang masih baru menghadirkan tantangan pengelolaan seperti pengelolaan operasional, pemeliharaan lingkungan, penyusunan peraturan pendakian dan pengelolaan keselamatan bagi wisatawan. Penelitian oleh Sulistiowati *et al.*, (2021) menekankan

bahwa daya tarik wisata yang baru berkembang sangat rentan terhadap masalah pengelolaan apabila tidak didukung dengan pembagian peran *stakeholder* yang jelas dan koordinasi yang efektif.

Meskipun pengembangan pendakian gunung telah banyak dikaji dalam konteks pariwisata alam, pengelolaan jalur pendakian yang baru dibuka memiliki tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian khusus. Saat ini, belum diketahui secara jelas bagaimana peran masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang, termasuk pembagian tanggung jawab, tingkat kepentingan, serta pengaruh antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan jalur pendakian tersebut.

Dalam pengelolaan daya tarik wisata alam, berbagai *stakeholder* seperti pemerintah daerah, pengelola jalur, masyarakat lokal, komunitas pendaki dan pihak lainnya memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda dan saling bekerja sama dalam pengelolaan jalur pendakian (Ardiansyah, 2021). Perbedaan tersebut menjadikan koordinasi dan kerja sama antar *stakeholder* sebagai faktor penting dalam mendukung pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan (Fatin, 2024). Melalui keterlibatan berbagai *stakeholder*, pengelolaan daya tarik wisata alam diharapkan dapat memperhatikan aspek keselamatan pengunjung, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Amalyah & Hakim, 2016).

Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang, terutama terkait pembagian peran, koordinasi, dan keterlibatan antar *stakeholder* yang belum berjalan secara optimal.

Selain itu, aspek keselamatan pendaki, pengawasan jalur, dan pengelolaan lingkungan juga masih memerlukan perhatian lebih agar aktivitas pendakian dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang masih memerlukan evaluasi terkait peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendukung pengelolaan jalur pendakian yang lebih baik di masa mendatang.

1.2.Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti akan memfokuskan pembahasan pada analisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang, Gunung Penanggungan. Analisis dilakukan melalui identifikasi *stakeholder* yang terlibat serta peran masing-masing *stakeholder* berdasarkan keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian aktivitas pendakian, keselamatan pendaki, dan kelestarian lingkungan. Untuk memahami bagaimana pengelolaan tersebut dijalankan, dilakukan pemetaan peran masing-masing *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan jalur pendakian menggunakan matriks *power-interest*. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran *stakeholder* pada Jalur Sumber Lumpang, Gunung Penanggungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholder* pada pengelolaan Jalur Pendakian Sumber Lumpang, Gunung Penanggungan. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi peran masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan jalur pendakian serta menyusun pemetaan peran *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan besarnya pengaruh yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa wisata minat khusus, seperti pendakian gunung, menekankan pengalaman wisata yang spesifik, menuntut kesiapan fisik wisatawan, serta memerlukan pengelolaan yang memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Fandeli & Chafid, 2002).

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan teori *stakeholder* dan konsep wisata minat khusus dalam pengelolaan daya tarik wisata. Hasil penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran *stakeholder* dalam pengelolaan jalur pendakian, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang mengkaji teori *stakeholder* dalam pengelolaan daya tarik wisata. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dan peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa di tempat wisata lainnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola Jalur Pendakian Sumber Lumpang dan pemangku kepentingan

lainnya sebagai bahan masukan dalam pengelolaan jalur pendakian secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan daya tarik wisata dan mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wisata minat khusus.